
BAB IV

PENUTUP

1. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Sasaran Strategik

Beberapa gambaran keberhasilan atas penyelenggaraan pembangunan di Daerah secara normatif setidaknya ditunjukkan dengan terjadinya perubahan yang signifikan dalam kesejahteraan masyarakatnya. Namun untuk mencermati perbaikan kesejahteraan masyarakat tidaklah sederhana, karena konsep kesejahteraan tidaklah hanya menyangkut tampilan fisik dari masyarakatnya melalui penggambaran kenaikan laju pertumbuhan ekonomi saja, tetapi lebih jauh lagi melalui peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan dan membaiknya tingkat pendidikan.

Dalam mewujudkan kondisi masyarakat seperti di atas tentu memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pelaku secara bersama-sama untuk bekerja keras dan bertanggungjawab melaksanakan pembangunan di segala bidang. Kontribusi pembangunan dari seluruh pelaku secara sinergi dan menghimpun seluruh sumber daya baik sektor Pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat luas akan membuahkan percepatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah dan variasi bencana terbanyak di Indonesia. Dari mulai gempa bumi, tsunami, gunung berapi, puting beliung, banjir, tanah longsor, banjir bandang dan lain-lain. Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Jawa Barat juga memprediksi bahwa sebanyak 14 Kabupaten/Kota dan 199 Kecamatan berpotensi banjir serta 12 Kabupaten/Kota dan 81 Kecamatan berpotensi terjadi bencana tanah longsor.

Secara umum implementasi program dari kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2016 sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah menunjukan

tingkat pencapaian output kegiatan tahun 2016 dengan alokasi anggaran Rp.27.059.202.004,- yang dialokasikan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang secara keseluruhan telah direalisasikan sebesar Rp. 23.720.614.866,- atau sebesar 87,66 %, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Gaji Rp. 8.410.068.004,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.047.015.848,- (95,68%) dan Belanja Langsung (BL) Kegiatan Rp. 18.649.134.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.673.599.018,- (84,04 %).

Adapun indikator kinerja lainnya diharapkan mempunyai kecenderungan meningkat secara signifikan. Sedangkan kegagalan kinerja sasaran strategik tidak ada karena semua kegiatan yang direncanakan dapat diselenggarakan.

1. KENDALA, HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEJIK DAN STRATEGI PEMECAHANNYA

Kendala :

Kondisi lingkungan perlu dianalisa oleh suatu organisasi untuk menyusun strategi dalam pencapaian misi organisasi. Lingkungan strategis organisasi dapat dianalisis melalui analisa lingkungan internal dan eksternal yang disebut dengan analisa SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats*).

Analisa lingkungan strategis tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

1) *Strength* (Kekuatan)

- a. Adanya kewenangan organisasi untuk memfasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- c. Tersedianya dana yang cukup memadai untuk membiayai organisasi.

2) *Weaknesses* (Kelemahan)

- a. Lemahnya sistem informasi;
- b. Profesionalisme aparaturnya belum memadai;
- c. Masih lemahnya koordinasi antar lini;

B. Lingkungan Eksternal

1) *Opportunities* (Peluang)

- a. Adanya peraturan tentang Kebencanaan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Adanya tuntutan, keterbukaan dan keinginan untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana;
- c. Adanya dukungan regulasi untuk kebencanaan dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Bencana Alam Dan perlindungan Masyarakat di berbagai bidang;
- d. Adanya potensi sumber daya masyarakat yang belum dikembangkan secara optimal dalam rangka pengurangan resiko bencana.

2) *Threats* (Ancaman)

- a. Inkonsistensi peraturan perundang-undangan tentang kebencanaan yang dapat mengakibatkan perbedaan persepsi dan pemahaman;
- b. Adanya ego sektoral dan arogansi Kabupaten/Kota yang belum sejalan dengan persepsi BPBD Provinsi Jawa Barat;
- c. Adanya krisis ekonomi dan politik sangat mempengaruhi pencapaian proses penanggulangan bencana.

Hambatan :

- (1) Belum Optimalnya Penanganan dan Penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota dikarenakan penanganan bencana yang terjadi baik pada saat pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana masih dilakukan secara parsial terutama Kabupaten/Kota yang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- (2) Terbatasnya SDM Penanggulangan Bencana yang handal dalam pemanfaatan IPTEK dalam rangka mengurangi resiko bencana termasuk pemanfaatan system-system peringatan dini berbasis teknologi.
- (3) Belum optimalnya program-program pembangunan yang berperspektif pengurangan resiko serta penataan ruang yang berdasarkan pemetaan dan pengkajian resiko bencana sehingga menyulitkan penanganan kedaruratan bencana maka Sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih diarahkan pada pencegahan dan kesiapsiagaan dalam upaya pengurangan resiko bencana.

Pemecahan Masalah :

- a. Perlu adanya Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan BPBD Provinsi maupun Kab/Kota dan sinergitas program dan kegiatan agar memudahkan koordinasi dalam penanggulangan bencana baik pada pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana serta mendorong Kabupaten/Kota untuk membentuk BPBD tingkat Kabupaten/Kota yang belum memiliki BPBD. Melakukan sinergitas program dan kegiatan lintas SKPD, baik dalam lingkup kab/kota, provinsi maupun dengan Kementerian & Lembaga di tingkat pusat.



- b. Peningkatan SDM PB dan sistem penanggulangan bencana berbasis informasi geografis yang handal sehingga pada saat penanggulangan bencana dapat terarah, terpadu terorganisasi dan menyeluruh.
- c. Sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih diarahkan pada pencegahan dan kesiapsiagaan dalam upaya pengurangan resiko bencana.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016 dibuat untuk memenuhi kewajiban memberikan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran sekaligus sebagai data informasi untuk bahan penyusunan LKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat serta sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2016.

Bandung, Januari 2017

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Dr.R. HARYADI WARGADIBRATA,Drs., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610720 198803 1 007